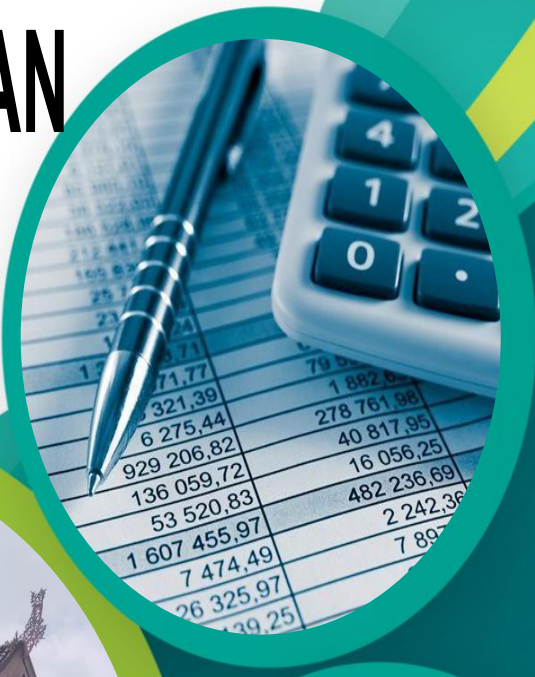


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAGIAN I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izin-Nya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengurus urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyajikan kebijakan akuntansi terhadap rincian dan penjelasan pendapatan, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana hanya pada pos Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam laporan ini, sebagaimana termuat dalam DPA dan DPPA yang menjadi kewenangan pertanggungjawaban OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Kami menyadari bahwa Catatan atas Laporan Keuangan ini, masih belum sempurna, oleh sebab itu, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Semoga penyusunan laporan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Makassar, 02 Januari 2026.
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
Selaku Pengguna Anggaran

TTD

Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, S.E., M.T
NIP. 19660902 198810 1 001
Pangkat: Pembina Utama Madya

BAGIAN II

DAFTAR ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGIAN I	KATA PENGANTAR	i
BAGIAN II	DAFTAR ISI	ii
BAGIAN III	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
	B. NERACA	1
	C. LAPORAN OPERASIONAL	2
	D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	2
	E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	2
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ...	4
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL.....	5
	2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel ...	5
	I. Pendapatan	5
	II. Belanja	5
	2.1. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	8
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL	9
	3.1. Laporan Realisasi Anggaran	9
	3.1.1. Pendapatan	9
	3.1.2. Belanja	9
	3.1.2.a. Belanja Operasi	10
	3.1.2.b. Belanja Modal	12
	3.2. Laporan Operasional (LO)	13
	3.2.1. Pendapatan-LO	13
	3.2.2. Beban	13
	3.2.2.a. Beban Operasi	13
	3.2.2.b. Beban Penyusutan dan Amortisasi	16
	3.3. Neraca	17
	3.3.1. Aset	17
	3.3.2. Kewajiban	20
	3.3.3. Ekuitas	20
	3.4. Laporan Perubahan Ekuitas	21

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI

NON KEUANGAN OPD	22
A. Struktur Organisasi OPD	22
B. Tugas dan Fungsi OPD	23
C. Sumber Daya OPD	24
D. Visi dan Misi	27
E. Program dan Kegiatan OPD	27

BAB V PENUTUP 29

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rekening Koran	
Lampiran 2 : Surat Tanda Setoran	
Lampiran 3 : Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025	
Lampiran 4 : Daftar Aset Tetap	
Lampiran 5 : Daftar Persediaan	
Lampiran 6 : Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan	
Lampiran 7 : SPJ Belanja-Fungsional	
Lampiran 8 : Daftar Hutang	
Lampiran 9 : Laporan Akrua (Neraca, Neraca Saldo, LO dan LPE)	
Lampiran 10 : Kertas Kerja	

BAGIAN III

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Neraca Saldo
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- f. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana yang terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 02 Januari 2026.
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
Selaku Pengguna Anggaran

TTD

Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, S.E., M.T
NIP. 19660902 198810 1 001
Pangkat: Pembina Utama Madya

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Neraca Saldo
- D. Laporan Operasional;
- E. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- F. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai:

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi.
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah;

- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD
- BAB V : Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

I. Pendapatan

Berkenaan dengan kebijakan keuangan yang diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk ulang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari segi pendapatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel ditargetkan dalam pendapatan asli daerah berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan nilai target pendapatan sebesar Rp.19.260.000,- di tahun 2025.

II. Belanja

Dari segi belanja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Kegiatan Belanja Daerah dan Pembiayaan. Dari segi neraca, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebagai pengguna aset dan melakukan pencatatan atas aset tetap serta melakukan pengadaan sesuai kebutuhan pada setiap kegiatan belanja daerah yang secara administrasi perhitungan neraca terpusat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun posisi keuangan periode Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel mendapat alokasi belanja daerah sebesar Rp.10.818.163.610,62 yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.9.816.516.610,62 dan terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp.8.555.372.620,62 serta belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.261.143.990,00 dan untuk belanja modal pada tahun 2025 sebesar Rp.1.001.647.000,00 yang anggarannya bersumber dari APBD Prov. Sulsel dengan realisasi anggaran belanja daerah sampai 31 Desember 2025 mencapai Rp.10.553.886.606,00 atau 97,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp.264.277.004.62, pada belanja tersebut dapat

dijabarkan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi yang memiliki 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
A.	PENDAPATAN DAERAH	100.00	19,260,000.00	100.00	9,630,000.00	100.00	50.00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.00	19,260,000.00	100.00	9,630,000.00	100.00	50.00
1.1	Retribusi Daerah	100.00	19,260,000.00	100.00	9,630,000.00	100.00	50.00
1.1.1	Retribusi Jasa Usaha	100.00	19,260,000.00	100.00	9,630,000.00	100.00	50.00
		Pihak penyewa pada tahun sebelumnya di tahun 2024 tidak lagi melanjutkan sewanya pada tahun ini tahun 2025 yang mengakibatkan tidak adanya realisasi pendapatan dari bulan januari sampai dengan bulan juni dan ada pihak penyewa yang baru dengan PKS mulai pada bulan juli sampai dengan bulan desember					
B.	BELANJA DAERAH	100.00	10,818,163,610.62	100.00	10,553,886,606.00	99,95	97.56
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.00	10,388,630,610.62	100.00	10,141,076,473.00	99,95	97.62
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	6,828,300.00	100.00	6,357,900.00	100.00	93.11
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.6.357.900,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 100%					
	Hasil	Cakupan dokumen yang telah tersusun terkait perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,828,300.00	3 Dokumen	6,357,900.00	100.00	93.11
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	8,896,112,620.62	100.00	8,679,325,327.00	100.00	97.56
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.8.679.325.327,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan laporan administrasi Keuangan tepat waktu 100%					
	Hasil	Cakupan laporan yang telah dibuat terkait administrasi keuangan tepat waktu 100%					
	Sumber Pendanaan	Dana Alokasi Umum (DAU)					
	Lokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	8,896,112,620.62	50 Orang	8,679,325,327.00	100.00	97.56
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	152,556,600.00	100.00	149,032,411.00	100.00	97.69
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.149,032,411.00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan laporan administrasi barang milik daerah 100%					
	Hasil	Cakupan laporan yang telah dibuat terkait administrasi barang milik daerah 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang					
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	8,456,200.00	1 Paket	8,127,800.00	100.00	96.12
1.3.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,001,600.00	1 Laporan	6,887,400.00	100.00	68.86
		Kurangnya intensitas kunjungan tamu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka rapat, studi banding dan lain-lain yang menyebabkan realisasi pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak terpenuhi.					
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134,098,800.00	1 Laporan	134,017,211.00	100.00	99.94
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	1,001,647,000.00	100.00	984,290,000.00	100.00	98.27
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.984.290.000,00					
	Keluaran	Persentasi keterpenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 2 unit					
	Hasil	Cakupan pengadaan barang milik daerah yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang					

1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	858,800,000.00	1 Unit	857,690,000.00	100.00	99.87
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	142,847,000.00	1 Unit	126,600,000.00	100.00	88.63
		Sudah terpenuhi Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya akan tetapi adanya selisih harga pada aplikasi BAJU BODO dan SSH yang menyebabkan persentase realisasi berkurang					
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	287,344,690.00	100.00	285,169,735.00	100.00	99.24
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.285.169.735,00					
	Keluaran	Persentasi pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100%					
	Hasil	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang					
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	287,344,690.00	1 Laporan	285,169,735.00	100.00	99.24
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	44,141,400.00	100.00	36,901,100.00	87,84	83.60
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.36.901.100,00					
	Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 9 unit					
	Hasil	Cakupan barang milik daerah yang telah terpenuhi 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang					
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraaan Dinas Jabatan	6 Unit	38,775,000.00	6 Unit	36,901,100.00	100.00	95.17
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	3 Unit	5,366,400.00	3 Unit	0.00	0.00	0.00
		Adanya penarikan kendaraan yang menyebabkan kendaraan operasional dan lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak tersedia					
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100.00	360,877,200.00	100.00	344,767,933.00	100.00	95.54
2.1	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100.00	360,877,200.00	100.00	344,767,933.00	100.00	95.54
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.344.767.933,00					
	Keluaran	Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100%					
	Hasil	Cakupan kab/kota yang telah difasilitasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
2.1.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	360,877,200.00	1 Laporan	344,767,933.00	100.00	95.54
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100.00	18,070,600.00	100.00	17,560,000.00	100.00	97.17
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	100.00	4,860,000.00	100.00	4,790,000.00	100.00	98.56
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.4.790.000,00					
	Keluaran	Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
	Hasil	Cakupan Kab/Kota yang telah difasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Lokasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
3.1.1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	4,860,000.00	1 Laporan	4,790,000.00	100.00	98.56
3.2	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	13,210,600.00	100.00	12,770,000.00	100.00	96.66
	Masukan	Dana yang terealisasi Rp.12.770.000,00					
	Keluaran	Persentasi kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					

Hasil		Cakupan kab/kota yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
3.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	13,210,600.00	1 Laporan	12,770,000.00	100.00	96.66
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100.00	19,715,200.00	100.00	19,612,200.00	100.00	99.48
4.1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	19,715,200.00	100.00	19,612,200.00	100.00	99.48
Masukan		Dana yang terealisasi Rp.19.612.200,00					
Keluaran		Persentase pengelolaan data kependudukan skala provinsi 100%					
Hasil		Cakupan pengelolaan data kependudukan skala provinsi 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
4.1.1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/kota	1 Dokumen	19,715,200.00	1 Dokumen	19,612,200.00	100.00	99.48
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.00	30,870,000.00	100.00	30,870,000.00	100.00	100.00
5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	100.00	30,870,000.00	100.00	30,870,000.00	100.00	100.00
Masukan		Dana yang terealisasi Rp.30.870.000,00					
Keluaran		Persentasi ketersediaan profil dan data kependudukan skala provinsi 100%					
Hasil		Cakupan ketersediaan profil dan data kependudukan skala provinsi 100%					
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Lokasi		Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Panaikang					
5.1.1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	2 Dokumen	30,870,000.00	2 Dokumen	30,870,000.00	100.00	100.00

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara umum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam hal hampir setiap kegiatan ada beberapa yang nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pagu kegiatan lebih tinggi dari harga pasar yang sesuai kenyataannya dan menyebabkan terdapatnya sisa anggaran yang berlebih, serta penyiapan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berakselerasi dengan cepat sejalan dengan dinamika perkembangan penduduk dan paradigma masyarakat.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SULSEL

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel, pada pendapatan asli daerah (PAD) mengelola retribusi jasa usaha yang ditargetkan selama 12 bulan pada TA. 2025 sebesar Rp.19.260.000,00 dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.9.630.000,00 atau 50% yang disebabkan adanya kekosongan penyewa pada bulan Januari hingga bulan Juni dan baru adanya lagi penyewa yang Perjanjian Kerjas Sama (PKS) mulai berlaku di bulan Juli hingga Desember. PAD pada TA. 2024 sebesar Rp.19.260.000,00 akan tetapi pada anggaran perubahan Tahun 2024 target pendapatan ditiadakan karena kemampuan penyewa tidak bisa membayar lagi dan hanya terbayar selama 4 bulan saja sebesar Rp.6.420.000,00. serta pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan nilai realisasi sebesar Rp.3.046.050,00 dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.19.260.000,00	Rp.9.630.000,00	50,00	Rp.9.466.050,00
I	Retribusi Daerah	Rp.19.260.000,00	Rp.9.630.000,00	50,00	Rp.6.420.000,00
1	Retribusi Jasa Usaha	Rp.19.260.000,00	Rp.9.630.000,00	50,00	Rp.6.420.000,00
II	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	Rp.3.046.050,00
1	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	Rp.16.050,00
2	Pendapatan dari Pengembalian	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	Rp.3.030.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	Rp.9.466.050,00

3.1.2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel mendapat belanja yang dimasukan dalam laporan realisasi anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Daerah	Rp.10.818.163.610,62	Rp.10.553.886.606,00	97,56	Rp.9.566.303.974,00

Anggaran belanja senilai Rp.10.818.163.610,62 dan realisasi senilai Rp.10.553.886.606,00 atau 97,56% dan untuk tahun 2024 dengan realisasi Rp.9.556.303.974,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
	Belanja Daerah	Rp.10.818.163.610,62	Rp10.553.886.606,00	97,56	Rp9.566.303.974,00
1	Belanja Operasi	Rp.9.816.516.610,62	Rp.9.569.596.606,00	97.48	Rp.9.566.303.974,00
2	Belanja Modal	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98.27	Rp.0,00
	Jumlah Belanja	Rp.10.818.163.610,62	Rp.10.553.886.606,00	97,56	Rp.9.566.303.974,00

3.1.2.a. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Operasi	Rp.9.816.516.610,62	Rp.9.569.596.606,00	97,48	Rp.9.566.303.974,00

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.9.569.596.606,00 atau 97,48% dari anggaran Rp.9.816.516.610,62 dan untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.9.566.303.974,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
	Belanja Operasi	Rp.9.816.516.610,62	Rp.9.569.596.606,00	97,48	Rp.9.566.303.974,00
1	Belanja Pegawai	Rp.8.555.372.620,62	Rp.8.405.185.327,00	98,24	Rp.7.941.766.304,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.261.143.990,00	Rp.1.164.411.279,00	92,33	Rp.1.624.537.670,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.9.816.516.610,62	Rp.9.569.596.606,00	97,48	Rp.9.566.303.974,00

3.1.2.a.1. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pegawai	Rp.8.555.372.620,62	Rp.8.405.185.327,00	98,24	Rp. 7.941.766.304,00

Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel sebesar Rp.8.555.372.620,62 dapat direalisasi sebesar Rp.8.405.185.327,00 atau 98,24% dan untuk TA. 2024 sebesar Rp.7.941.766.304,00 dengan Rincian Belanja Pegawai TA. 2025 yang terbagi atas belanja PNS dan PPPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp.2.560.562.262,50	Rp.2.509.044.738,00	97,99	Rp.2.489.892.900,00
2.	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp.539.053.875,00	Rp.518.736.884,00	96,23	Rp.171.712.800,00
3.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp.228.366.949,00	Rp.217.746.916,00	95,35	Rp.219.507.352,00
4.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp.44.782.279,00	Rp.42.904.326,00	95,81	Rp.12.069.288,00
5.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp.122.613.750,00	Rp.121.100.000,00	98,77	Rp.112.280.000,00
6.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp.82.782.000,00	Rp.81.530.000,00	98,49	Rp.86.360.000,00
7.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp.7.371.000,00	Rp.7.280.000,00	98,77	Rp.7.280.000,00
8.	Belanja Tunjangan Fungsional umum PNS	Rp.87.946.000,00	Rp.85.585.000,00	97,32	Rp.85.635.000,00
9.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp.30.105.375,00	Rp.29.035.000,00	96,44	Rp.7.630.000,00
10.	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp.127.506.273,00	Rp.121.448.340,00	95,25	Rp.123.258.840,00
11.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp.34.122.495,00	Rp.32.082.060,00	94,02	Rp.10.138.800,00
12.	Belanja Tunjangan pph/Tunjangan khusus PNS	Rp.30.304.444,50	Rp.27.969.526,00	92,30	Rp.25.946.040,00
13.	Belanja Tunjangan pph/Tunjangan khusus PPPK	Rp.694.386,00	Rp.694.386,00	100,00	Rp.340.899,00
14.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp.36.694,88	Rp.35.018,00	95,43	Rp.33.613,00
15.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp.13.567,55	Rp.7.735,00	57,01	Rp.3.354,00
16.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp.303.194.714,92	Rp.298.838.622,00	98,56	Rp.102.933.513,00
17.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp.23.868.541,00	Rp.22.770.552,00	95,40	Rp.6.824.599,00
18.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp.5.310.848,22	Rp.5.163.211,00	97,22	Rp.5.135.253,00
19.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp.1.275.956,00	Rp.1.185.462,00	92,91	Rp.353.918,00
20.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp.15.932.692,75	Rp.15.489.772,00	97,22	Rp.15.405.787,00
21.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp.3.727.844,00	Rp.3.556.269,00	95,40	Rp.1.061.730,00
22.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	Rp.1.502.485.827,00	Rp.1.474.070.784,00	98,11	Rp.1.339.787.269,00
23.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	Rp.1.073.321.624,00	Rp.1.063.548.010,00	99,09	Rp.1.350.561.530,00
24.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	Rp.1.729.993.221,00	Rp.1.725.362.716,00	99,73	Rp.1.461.758.819,00
25.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	Rp.305.855.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp.8.555.372.620,62	Rp.8.405.185.327,00	98,24	Rp.7.941.766.304,00

3.1.2.a.2. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.261.143.990,00	Rp.1.164.411.279,00	92,33	Rp.1.624.537.670,00
1.	Belanja Barang	Rp.129.855.600,00	Rp.122.287.200,00	94,17	Rp.520.687.200,00
2.	Belanja Jasa	Rp.718.934.690,00	Rp.633.419.635,00	88,11	Rp.655.254.782,00
3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.9.657.500,00	Rp.8.125.000,00	84,13	Rp.42.425.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.402.696.200,00	Rp.400.579.444,00	99,47	Rp.406.170.686,00
Jumlah		Rp.1.261.143.990,00	Rp.1.164.411.279,00	92,33	Rp.1.624.537.670,00

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel tahun 2025 sebesar Rp.1.261.143.990,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.164.411.279,00 atau 92,33%. Dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.624.537.670,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa T.A. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Barang	129.855.600,00	122.287.200,00	94,17	520.687.200,00
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	23.033.900,00	20.066.200,00	87,12	65.187.100,00
	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	35.416.100,00	34.911.600,00	98,58	115.827.200,00
	Belanja Kertas dan Cover	8.172.000,00	7.778.000,00	95,18	27.902.000,00
	Belanja Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00
	Belanja Bahan Komputer	6.432.000,00	6.344.000,00	98,63	40.092.000,00
	Belanja Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	180.500,00
	Belanja Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	6.566.600,00
	Belanja Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.400.000,00	46.900.000,00	93,06	207.160.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.401.600,00	6.287.400,00	98,22	8.547.500,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	44.530.000,00
	Belanja Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	386.300,00
2.	Belanja Jasa	718.934.690,00	633.419.635,00	88,11	655.254.782,00
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	66.800.000,00	52.800.000,00	79,04	39.350.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	266.700.000,00	264.700.000,00	99,25	483.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	82.423.152,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	11.450.000,00	8.709.900,00	76,07	8.716.580,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	332.580.000,00	272.100.000,00	81,81	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	2.040.000,00	25,00	0,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	18.314.190,00	18.158.985,00	99,15	33.227.124,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	1.035.804,00	1.027.026,00	99,15	1.927.968,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN	1.294.696,00	1.283.724,00	99,15	2.409.960,00
3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.657.500,00	8.125.000,00	84,13	42.425.000,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.657.500,00	8.125.000,00	84,13	29.380.000,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	4.385.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	402.696.200,00	400.579.444,00	99,47	406.170.686,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	402.696.200,00	400.579.444,00	99,47	405.660.686,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Jumlah		1.261.143.990,00	1.164.411.279,00	92,33	1.624.537.670,00

Keterangan :

- **Belanja Jasa :**

1. Pada Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia adanya kegiatan KISAK yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di 5 (lima) Kabupaten/Kota telah berhalangan untuk hadir Narasumber Ketua Tim Penggerak PKK makanya untuk pembayaran honor tersebut tidak direalisasikan.

2. Pada Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan adanya penarikan kendaraan yang menyebabkan kendaraan operasional dan lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak tersedia hingga tidak adanya penyerapan realisasi
 3. Pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dengan adanya regulasi terbaru terkait pembayaran tambahan TPP, nilai sebelumnya menjadi berkurang yang menyebabkan penyerapan realisasi juga ikut berkurang.
 4. Pada Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dengan adanya regulasi terbaru terkait pembayaran tambahan TPP, nilai sebelumnya menjadi berkurang yang menyebabkan penyerapan realisasi juga ikut berkurang.
- **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :**
1. Pada Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan nilai realisasi sudah sesuai mengikuti dengan nilai dari tempat pemeliharaan/bengkel yang menyebabkan masih banyaknya anggaran yang tersisa.

3.1.2.b. Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Modal	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98,27	Rp.0,00

Belanja Modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel tahun 2025 sebesar Rp.1.001.647.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.984.290.000,00 atau 98,27% dan Untuk tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sulsel tidak menganggarkan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
	Belanja Modal	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98,27	Rp.0,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98,27	Rp.0,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98,27	Rp.0,00

3.1.2.b.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98,27	Rp.0,00
1.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.858.800.000,00	Rp.857.690.000,00	99,87	Rp.0,00
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp.13.158.000,00	Rp.13.000.000,00	98,80	Rp.0,00
3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp.129.689.000,00	Rp.113.600.000,00	87,59	Rp.0,00
	Jumlah	Rp.1.001.647.000,00	Rp.984.290.000,00	98,27	Rp.0,00

Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.001.647.000,00 dan untuk di Tahun Anggaran 2024 Belanja modal peralatan dan mesin tidak dianggarkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	858.800.000,00	857.690.000,00	99,87	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	858.800.000,00	857.690.000,00	99,87	0,00
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.158.000,00	13.000.000,00	98,80	0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	13.158.000,00	13.000.000,00	98,80	0,00
3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	129.689.000,00	113.600.000,00	87,59	0,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.909.000,00	8.300.000,00	93,16	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	120.780.000,00	105.300.000,00	87,18	0,00
	Jumlah	1.001.647.000,00	984.290.000,00	98,27	0,00

Keterangan :

- **Belanja Modal Peralatan Komputer :**

1. Pada Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sudah terpenuhinya Belanja Modal tersebut akan tetapi adanya selisih harga pada aplikasi BAJU BODO dan SSH yang menyebabkan persentase realisasi berkurang.

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2025 sebesar Rp.9.630.000,00 sedangkan di TA. 2024 sebesar Rp.9.466.050,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan – LO	9.630.000,00	9.466.050,00	163.950,00	1.73
1.	Retribusi Daerah – LO	9.630.000,00	6.420.000,00	3.210.000,00	50.00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	9.6300.000,00	6.420.000,00	3.210.000,00	50.00
2.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	3.046.050,00	(3.046.050,00)	(100.00)
	Pendapatan Denda Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	0,00	16.050,00	(16.050,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	0,00	3.030.000,00	(3.030.000,00)	(100,00)
	Jumlah	9.630.000,00	9.466.050,00	163.950,00	1.73

Ket :
- Retribusi Daerah :
• Pada persentase penyerapan PAD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang hanya mencapai 50% saja disebabkan adanya kekosongan penyewa pada bulan Januari hingga bulan Juni dan baru adanya lagi penyewa yang Perjanjian Kerjasama (PKS) mulai berlaku di bulan Juli hingga Desember tahun 2025.

3.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam masa pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau ekonomi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, nilai beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.9.447.455.223,65 dan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10.093.187.417,85 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
	Beban – LO	9.447.455.223,65	10.093.187.417,85	(645.732.194,20)	(6.40)
1.	Beban Operasi – LO	9.155.041.937,00	9.631.955.665,00	(476.913.728,00)	(4.95)
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	292.413.286,65	461.231.752,85	(168.818.466,20)	(36.60)
	Jumlah	9.447.455.223,65	10.093.187.417,85	(775.252.230,53)	(6.40)

3.2.2.a. Beban Operasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
I	Beban Operasi – LO	9.155.041.937,00	9.631.955.665,00	(476.913.728,00)	(4.95)
1.	Beban Pegawai – LO	8.012.056.158,00	7.981.972.695,00	30.083.463,00	0.38
2.	Beban Barang dan Jasa – LO	1.142.985.779,00	1.649.982.970,00	(506.997.191,00)	(30.73)
	Jumlah	9.155.041.937,00	9.631.955.665,00	(476.913.728,00)	(4.95)

Beban Operasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggran 2024 yang terdiri dari :

a. Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Pegawai – LO	8.012.056.158,00	7.981.972.695,00	30.083.463,00	0.38

Beban Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji Pokok PNS – LO	2.509.044.738,00	2.489.892.900,00	19.151.838,00	0,77
2	Beban Gaji Pokok PPPK – LO	518.736.884,00	171.712.800,00	347.024.084,00	202,10
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO	217.746.916,00	219.507.352,00	(1.760.436,00)	(0,80)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK – LO	42.904.326,00	12.069.288,00	30.835.038,00	255,48
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	121.100.000,00	112.280.000,00	8.820.000,00	7,86
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	81.530.000,00	86.360.000,00	(4.830.000,00)	(5,59)
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK - LO	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	85.585.000,00	85.635.000,00	(50.000,00)	(0,06)
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK - LO	29.035.000,00	7.630.000,00	21.405.000,00	280,54
10	Beban Tunjangan Beras PNS - LO	121.448.340,00	123.258.840,00	(1.810.500,00)	(1,47)
11	Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	32.082.060,00	10.138.800,00	21.943.260,00	216,43
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	27.969.526,00	25.946.040,00	2.023.486,00	7,80
13	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - LO	694.386,00	340.899,00	353.487,00	103,69
14	Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	35.018,00	33.613,00	1.405,00	4,18
15	Beban Pembulatan Gaji PPPK - LO	7.735,00	3.354,00	4.381,00	130,62
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	241.009.154,00	160.762.981,00	80.246.173,00	49,92
17	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - LO	22.770.552,00	6.824.599,00	15.945.953,00	233,65
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	5.163.211,00	5.135.253,00	27.958,00	0,54
19	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - LO	1.185.462,00	353.918,00	831.544,00	234,95
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	15.489.772,00	15.405.787,00	83.985,00	0,55
21	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK - LO	3.556.269,00	1.061.730,00	2.494.539,00	234,95
22	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	1.360.816.308,00	1.343.559.192,00	17.257.116,00	1,28
23	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS - LO	974.163.807,00	1.304.456.635,00	(330.292.828,00)	(25,32)
24	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	1.592.701.694,00	1.486.468.714,00	106.232.980,00	7,15
25	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	0,00	305.855.000,00	(305.855.000,00)	(100,00)
Jumlah		8.012.056.158,00	7.981.972.695,00	30.083.463,00	0,38

b. Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang dan Jasa – LO	1.142.985.779,00	1.649.982.970,00	(506.997.191,00)	(30,73)
1.	Beban Barang – LO	128.346.700,00	518.647.500,00	(390.300.800,00)	(75,25)
2.	Beban Jasa – LO	605.934.635,00	682.739.784,00	(76.805.149,00)	(11,25)
3.	Beban Pemeliharaan – LO	8.125.000,00	42.425.000,00	(34.300.000,00)	(80,85)
4.	Beban Perjalanan Dinas – LO	400.579.444,00	406.170.686,00	(5.591.242,00)	(1,38)
Jumlah		1.142.985.779,00	1.649.982.970,00	(506.997.191,00)	(30,73)

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.
Sulsel Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas :

b.1. Beban Barang

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Barang – LO	128.346.700,00	518.647.500,00	(390.300.800,00)	(75,25)

Beban barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.
Sulsel untuk periode TA. 2025 dan periode TA. 2024 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	20.066.200,00	65.187.100,00	(45.120.900,00)	(69,22)
2.	Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	530.000,00	530.000,00	(100,00)

3.	Beban Alat Tulis Kantor	35.912.900,00	115.304.600,00	(79.391.700,00)	(68,85)
4.	Beban Kertas dan Cover	9.130.200,00	28.875.500,00	(19.745.300,00)	(68,38)
5.	Beban Cetak	0,00	2.718.000,00	(2.718.000,00)	(100,00)
6.	Beban Bahan Komputer	10.050.000,00	37.601.400,00	(27.551.400,00)	(73,27)
7.	Beban Perabot Kantor	0,00	180.500,00	(180.500,00)	(100,00)
8.	Beban Alat Listrik	0,00	6.566.600,00	(6.566.600,00)	(100,00)
9.	Beban Suvenir/Cendera Mata	0,00	1.060.000,00	(1.060.000,00)	(100,00)
10.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	46.900.000,00	207.160.000,00	(160.260.000,00)	(77,36)
11.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.287.400,00	8.547.500,00	(2.260.100,00)	(26,44)
12.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	44.530.000,00	(44.530.000,00)	(100,00)
13.	Beban Alat Pembersih	0,00	386.300,00	(386.300,00)	(100,00)
Jumlah		128.346.700,00	518.647.500,00	(390.300.800,00)	(75,25)

b.2. Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Jasa Kantor – LO	605.934.635,00	682.739.784,00	(76.805.149,00)	(11,25)

Nilai Beban jasa pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel untuk periode TA. 2025 dan TA. 2024 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	52.800.000,00	39.350.000,00	18.400.000,00	87,83
2.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	264.700.000,00	483.600.000,00	(10.000.000,00)	(2,03)
3.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00
4.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	82.423.152,00	(82.423.152,00)	(100,00)
5.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
6.	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	8.709.900,00	8.716.580,00	(6.680,00)	(0,08)
7.	Beban Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	245.295.000,00	26.805.000,00	218.490.000,00	815,11
8.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00
9.	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	18.158.985,00	33.227.124,00	(15.068.139,00)	(45,35)
10.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.027.026,00	1.927.968,00	(900.942,00)	(46,73)
11.	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.283.724,00	2.409.960,00	(1.126.236,00)	(46,73)
Jumlah		605.934.635,00	682.739.784,00	(76.805.149,00)	(11,25)

b.3. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Pemeliharaan – LO	8.125.000,00	42.425.000,00	(34.300.000,00)	(80,85)

Nilai Beban Pemeliharaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel untuk periode TA. 2025 dan TA. 2024 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.125.000,00	29.380.000,00	(21.255.000,00)	(72,35)
2.	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	4.385.000,00	(4.385.000,00)	(100,00)
3.	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	0,00	3.020.000,00	(3.020.000,00)	(100,00)
4.	Beban Pemeliharaan Personal Computer	0,00	2.190.000,00	(2.190.000,00)	(100,00)
5.	Beban Pemeliharaan Peralatan Personal Computer	0,00	3.450.000,00	(3.450.000,00)	(100,00)
JUMLAH		8.125.000,00	42.425.000,00	(34.300.000,00)	(80,85)

b.4. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Perjalanan Dinas – LO	400.579.444,00	406.170.686,00	(5.591.242,00)	(1,38)

Nilai Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Untuk periode TA. 2025 dan TA. 2024 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	400.579.444,00	405.660.686,00	(5.081.242,00)	(1,25)
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	510.000,00	(510.000,00)	(100,00)
Jumlah		400.579.444,00	406.170.686,00	(5.591.242,00)	(1,38)

3.2.2.b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	292.413.286,65	461.231.752,85	(168.818.466,20)	(36,60)

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Untuk periode TA. 2025 dan TA. 2024 yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Penaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	115.585.830.94	221.974.028.59	(106.388.197,65)	(47,93)
2.	Beban Penyusutan Mesin Ketik	55.218.764.13	82.810.471.49	(27.591.707,36)	(33,32)
3.	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(100,00)
4.	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	56.583.758.78	85.591.486.64	(29.007.727,86)	(33,89)
5.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	39.200.953.19	39.200.953.21	(0,02)	0,00
6.	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	2.601.479.60	2.601.479.59	0,01	0,00
7.	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	333.333,34	333.333,33	0,01	0,00
8.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Frenchise	22.889.166,67	24.970.000,00	(2.080.833,33)	(8,33)
Jumlah		292.413.286,65	461.231.752,85	(168.818.466,20)	(36,60)

Dalam pos-pos laporan Keuangan terdapat selisih realisasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode TA. 2025 sebesar Rp.9.569.596.606,00 dengan Laporan Operasional (LO) periode TA. 2025 sebesar Rp.9.155.041.937,00 yang dijabarkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasional LRA	Rp. 9.569.596.606,00
Persediaan Tahun Lalu	Rp. 7.518.100,00
Persediaan Tahun Ini	Rp. (1.458.600,00)
Pembayaran Utang Tahun Lalu	Rp. (420.614.169,00)
Utang Tahun Ini	Rp. 0,00
Beban Operasi	Rp. 9.155.041.937,00

3.3. NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3.3.1. Aset

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
	ASET	2.986.759.001,92	2.323.189.407,60
	Jumlah Aset	2.986.759.001,92	2.323.189.407,60

Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi/perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel yang memiliki/mengelola aset pada tahun 2025 dan tahun 2024 terdapat penurunan nilai aset pada posisi aset lancar dan aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
	ASET	2.986.759.001,92	2.323.189.407,60
1.	Aset Lancar	1.458.600,00	7.518.100,00
2.	Aset Tetap	2.985.300.401,92	2.292.782.140,93
3.	Aset Lainnya	0,00	22.889.166,67
	Jumlah Aset	2.986.759.001,92	2.323.189.407,60

Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Laporan posisi keuangan atau neraca selalu menyajikan informasi tentang aset lancar dan komponen-komponennya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
	ASET LANCAR	1.458.600,00	7.518.100,00
I	Persediaan	1.458.600,00	7.518.100,00
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	1.001.300,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	1.458.600,00	3.706.000,00
3	Persediaan Bahan Komputer	0,00	2.810.800,00
	Jumlah Aset	1.458.600,00	7.518.100,00

Ket :
- Berdasarkan hasil opname fisik barang-barang persediaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan nomor : 021/2417/DISDUKCAPIL barang pakai habis dengan hasil sebagai berikut :
• Kertas dan Cover Rp.1.458.600,00

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2025

sebesar Rp.2.985.300.401,92 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.292.782.140,93 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
	ASET TETAP	2.985.300.401,92	2.292.782.140,93
1	Aset Peralatan dan Mesin	4.414.525.950,89	4.157.715.950,89
2	Aset Gedung dan Bangunan	2.774.847.941,95	2.774.847.941,95
3	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.725.850,00	105.725.850,00
4	Aset Akumulasi Penyusutan	(4.309.799.340,92)	(4.745.507.601,91)
	Jumlah Aset	2.985.300.401,92	2.292.782.140,93

Dengan rincian tersebut diatas, Aset Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel dapat dirincikan dengan komponen - komponen sebagai berikut :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 1-Jan-25	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2025		SALDO AKHIR 31-Des-25
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	PERALATAN DAN MESIN	4.157.715.950,89	984.290.000,00	8.300.000,00	735.780.000,00	4.414.525.950,89
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.774.847.941,95	-	-	-	2.774.847.941,95
3	JALAN IRIGASI JARINGAN	105.725.850,00	-	-	-	105.725.850,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(4.745.507.601,91)	(269.524.119,98)	-	(705.232.380,97)	(4.309.799.340,92)
TOTAL		2.292.782.140,93	714.765.880,02	8.300.000,00	30.547.619,03	2.985.300.401,92

1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulse untuk per 31 Desember 2025 sebesar Rp.4.414.525.950,89 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-25	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2025		SALDO AKHIR 31-Des-25
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Alat Angkutan	1.853.918.200,00	857.690.000,00	-	467.200.000,00	2.244.408.200,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	963.504.910,89	13.000.000,00	-	176.930.000,00	779.574.910,89
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	54.000.000,00	-	-	29.000.000,00	25.000.000,00
4	Komputer	1.286.292.840,00	113.600.000,00	8.300.000,00	62.650.000,00	1.345.542.840,00
TOTAL		4.157.715.950,89	984.290.000,00	8.300.000,00	735.780.000,00	4.414.525.950,89

- Ket :
- Belanja Modal :
 1. Belanja Kendaraan Bermotor Khusus Alat Angkutan – Kode : 1.3.02.02.01.0006 dengan nilai Rp.857.690.000,00
 2. Belanja Alat Pendingin Alat Kantor dan Rumah Tangga – Kode : 1.3.02.05.02.0004 dengan nilai Rp.13.000.000,00
 3. Komputer :
 - Belanja Peralatan Personal Komputer Alat Komputer – Kode : 1.3.02.10.02.0003 dengan nilai Rp.8.300.000,00
 - Belanja Peralatan Komputer Lainnya Alat Komputer – Kode : 1.3.02.10.02.0005 dengan nilai Rp.105.300.000,00
 - Bertambah :
 1. Reklasifikasi belanja APBD dari Peralatan dan Mesin-Peralatan personal Komputer kode: 1.3.02.10.02.0003 berdasarkan BA verifikasi Validasi No. 032/47//BKAD tanggal 5 Januari 2025 ke Peralatan Jaringan kode: 1.3.02.10.02.0004 Hardisk SSD internal dengan nilai Rp.8.300.000,00
 - Berkurang :
 1. Alat Angkutan :
 - Mutasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kode: 1.3.02.02.01.0001 Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Badan Keuangan dan Aset Tetap berdasarkan BA pengalihan Status Penggunaan no. 000.2.3.2/9844/BKAD tanggal 25 Agustus 2025 yaitu Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kode : 1.3.02.02.01.0001 dengan nilai Rp.233.600.000,00
 - Mutasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kode: 1.3.02.02.01.0001 Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke DINKES berdasarkan BA pengalihan Status Penggunaan no. 000.2.3.2/5100/BKADA tanggal 7 MEI 2025 yaitu Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kode : 1.3.02.02.01.0001 dengan nilai Rp.233.600.000,00
 2. Alat Kantor dan Rumah Tangga :
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Rusak Berat/Usang Kode: 1.5.04.01.01.0001 sesuai dengan SPTJM Kadis Dukcapil no, 32/1133/Disdukcapil/VI/2025 taqnggal 11 Juni 2025 tentang Usul hapus BMD Berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kode : 1.3.02.05.01.0004 dengan nilai Rp.9.000.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Rusak Berat/Usang Kode: 1.5.04.01.01.0001 sesuai dengan SPTJM Kadis Dukcapil no, 32/1133/Disdukcapil/VI/2025 taqnggal 11 Juni 2025 tentang Usul hapus BMD Berupa Meubelair kode: 1.3.02.05.02.0001 dengan nilai Rp.11.900.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Rusak Berat/Usang Kode: 1.5.04.01.01.0001 sesuai dengan SPTJM Kadis Dukcapil no, 32/1133/Disdukcapil/VI/2025 taqnggal 11 Juni 2025 tentang Usul hapus BMD Berupa Alat Pendingin kode: 1.3.02.05.02.0004 dengan nilai Rp.121.530.000,00
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Rusak Berat/Usang Kode: 1.5.04.01.01.0001 sesuai dengan SPTJM Kadis Dukcapil no, 32/1133/Disdukcapil/VI/2025 taqnggal 11 Juni 2025 tentang Usul hapus BMD Berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) kode: 1.3.02.05.02.0006 dengan nilai Rp.34.500.000,00

3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Rusak Berat/Usang Kode: 1.5.04.01.01.0001 sesuai dengan SPTJM Kadis Dukcapil no, 32/1133/Disdukcapil/VI/2025 taqnggal 11 Juni 2025 tentang Usul hapus BMD Berupa Alat Komunikasi Telephone kode: 1.3.02.06.02.0001 dengan nilai Rp.29.000.000,00
4. Komputer :
 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya- Aset Rusak Berat/Usang Kode: 1.5.04.01.01.0001 sesuai dengan SPTJM Kadis Dukcapil no, 32/1133/Disdukcapil/VI/2025 taqnggal 11 Juni 2025 tentang Usul hapus BMD Berupa Personal Komputer kode: 1.3.02.10.01.0002 dengan nilai Rp.54.350.000,00
 - Reklasifikasi belanja APBD dari Peralatan dan Mesin-Peralatan personal Komputer kode: 1.3.02.10.02.0003 berdasarkan BA verifikasi Validasi No. 032/47/I/BKAD tanggal 5 Januari 2025 ke Peralatan Jaringan kode: 1.3.02.10.02.0004 Hardisk SSD internal dengan nilai Rp.8.300.000,00

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan nilai bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.2.774.847.941,95 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-25	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2025		SALDO AKHIR 31-Des-25
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Bangunan Gedung	2.774.847.941,95	-	-	-	2.774.847.941,95
TOTAL		2.774.847.941,95	-	-	-	2.774.847.941,95

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan merupakan nilai instalasi dan jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.105.725.850,00 yang terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-25	BELANJA MODAL	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2025		SALDO AKHIR 31-Des-25
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Instalasi	95.725.850,00	-	-	-	95.725.850,00
2	Jaringan	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
TOTAL		105.725.850,00	-	-	-	105.725.850,00

Aset Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 terdiri dari :

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SALDO AWAL 01-Jan-25	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI 1 JAN S/D 31 DES 2025		SALDO AKHIR 31-Des-25
				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	99.880.000,00	-	-	-	99.880.000,00
3	Aset Lain-Lain	-	-	260.280.000,00	-	260.280.000,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(76.990.833,33)	(22.889.166,67)	-	-	(99.880.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	(260.280.000,00)	-	(260.280.000,00)
TOTAL		22.889.166,67	(22.889.166,67)	-	-	-

Ket :

- Aset Rusak Berat/Usang Aser Lain-Lain – Kode : 1.5.04.01.01.0001 dengan nilai Rp.260.280.000,00
- Beban Penyusutan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud – Kode : 1.5.05.01.01.0001 dengan nilai (Rp.22.889.166,67)
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain – Kode : 1.5.06.01.01.0002 dengan nilai (Rp.260.280.000,00)

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.309.799.340,92 terdiri dari :

NO	SKPD	SALDO AWAL 1 Januari 2025	PENYUSUTAN 1 JAN S/D 31 DES 2025			SALDO AKHIR 31 Desember 2025
			PENYUSUTAN 2025	BERTAMBAH	BERKURANG	
1	Peralatan dan Mesin	(3.771.258.585,81)	(227.388.353,83)	-	(705.232.380,97)	(3.293.414.558,67)
2	Gedung dan Bangunan	(935.333.734,19)	(39.200.953,19)	-	-	(974.534.687,38)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(38.915.281,91)	(2.934.812,96)	-	-	(41.850.094,87)
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	(4.745.507.601,91)	(269.524.119,98)	-	(705.232.380,97)	(4.309.799.340,92)

Ket :

- Penyusutan 2025 :
 1. Beban penyusutan peralatan dan mesin berupa :
 - Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.02.0001 Akumulasi penyusutan alat angkutan dengan nilai (Rp.115.585.830,92)
 - Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.05.0001 Akumulasi penyusutan alat kantor & rumah tangga dengan nilai (Rp.55.218.764,13)
 - Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.01.10.0001 Akumulasi penyusutan komputer dengan nilai (Rp.56.583.758,78)
 2. Beban penyusutan gedung dan bangunan berupa :
 - Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.02.01.0001 Akumulasi penyusutan bangunan gedung dengan nilai (Rp.39.200.953,19)
 3. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi berupa :
 - Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.03.03.0001 Akumulasi penyusutan instalasi dengan nilai (Rp.2.601.479,61)

- Akumulasi penyusutan Aset Tetap – Kode : 1.3.07.03.04.0001 Akumulasi penyusutan jaringan dengan nilai (Rp.333.333,35)
- Berkurang :
1. Beban penyusutan peralatan dan mesin berupa :
 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Kode: 1.3.07.01.02.0001 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan dengan nilai (Rp.444.952.380,97)
 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Kode: 1.3.07.01.05.0001 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga dengan nilai (Rp.176.930.000,00)
 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Kode: 1.3.07.01.06.0001 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi & Pemancar dengan nilai (Rp.29.000.000,00)
 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Kode: 1.3.07.01.10.0001 Akumulasi Penyusutan Komputer dengan nilai (Rp.54.350.000,00)

3.3.2. Kewajiban

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
	KEWAJIBAN	0,00	420.614.169,00
	Jumlah Kewajiban	0,00	420.614.169,00

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan Penilaian Utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Di tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Sulsel tidak memiliki Kewajiban Jangka Pendek berupa :

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	113.254.476,00
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	89.384.203,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	132.661.022,00
4.	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	26.805.000,00
5.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	680.000,00
6.	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	57.829.468,00
	Jumlah Utang	0,00	420.614.169,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang belum disetor di Kas Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.

3.3.3. Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos Neraca Pemerintah yang menumpang selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
	Jumlah Kewajiban	0,00	420.614.169,00
	Ekuitas	2.986.759.001,92	1.902.575.238,60
	- Ekuitas	(7.535.249.985,05)	(7.654.262.685,40)
	- RK PPKD	10.522.008.986,97	9.556.837.924,00
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.986.759.001,92	2.323.189.407,60

Ekuitas	Rp.	(7.535.249.985,05)
RK PPKD	Rp.	10.522.008.986,97
Jumlah Ekuitas	Rp.	2.986.759.001,92
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp.	2.986.759.001,92

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 :

PENJELASAN EKUITAS AKHIR NERACA

Saldo Awal 1 Januari 2025	Rp.	(7.654.262.685,40)
Surplus/(Defisit)-LO TA. 2025	Rp.	(9.437.825.223,65)
Rekening Konsolidasi (RK)	Rp.	9.556.837.924,00
Jumlah Ekuitas - LPE	Rp.	(7.535.249.985,05)

RK PPKD

SP2D LS Gaji	Rp.	8.639.345.327,00
SP2D LS Barang Jasa	Rp.	1.340.309.735,00
SP2D UP/GU/TU	Rp.	576.220.183,00
Jumlah Penerimaan RK PPKD	Rp.	10.555.875.245,00

Penyetoran Pendapatan	Rp.	(9.630.000,00)
Pengembalian Sisa TU 2025	Rp.	(1.582.739,00)
Pengembalian Sisa Kas 2025	Rp.	(405.900,00)
Jumlah Pengeluaran RK PPKD	Rp.	(11,618,639,00)

Jumlah RK PPKD	Rp.	10,544,256,606,00
Jumlah Ekuitas Akhir Neraca	Rp.	3,009,006,620.95

BAB IV

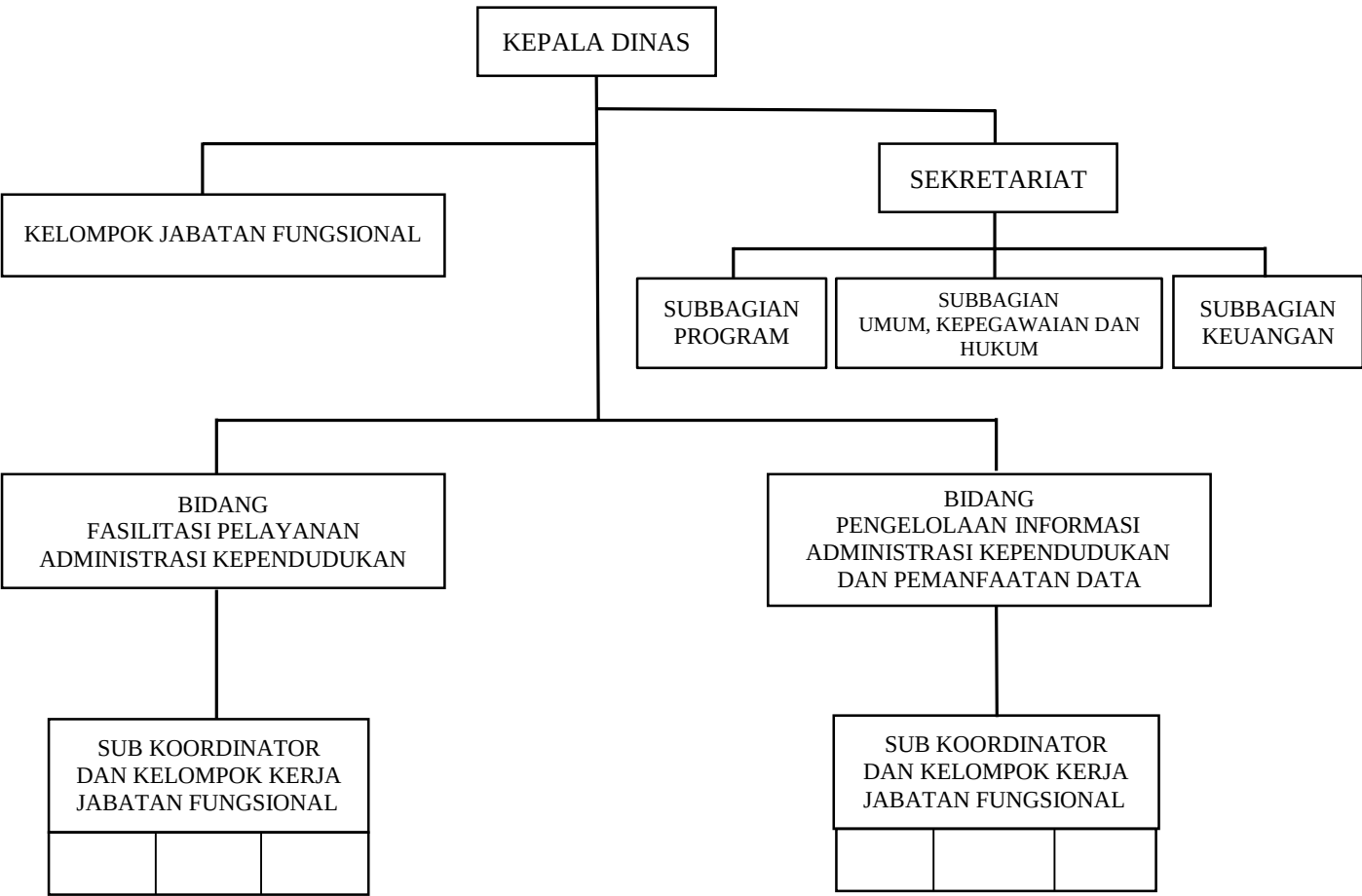
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Struktur Organisasi OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka jabatan struktural terdiri dari 13 (Tiga Belas) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian eselon IVA, 6 (enam) Sub koordinator, maka dapat disampaikan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, meliputi:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi.
5. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel



Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

B. Tugas dan Fungsi OPD

a. Tugas

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ini menyatakan bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemeritahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Fungsi Sekretaris adalah ;

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

- Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi bidang ini adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bina aparatur pendaftaran penduduk.
- Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas bina aparatur pencatatan sipil.
- Seksi Monitoring, Evaluasi, Dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, dan dokumentasi administrasi kependudukan.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Fungsi bidang ini diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- Seksi Kerja Sama, Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

- Seksi Monitoring Dan Evaluasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi administrasi kependuduka.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus PNS dan PPPK yang menurut data Desember Tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang yang berstatus PNS dan 25 (dua puluh lima) orang berstatus PPPK yang mana sebelumnya pada tahun 2024 ada 19 (sembilan belas) orang berstatus Non ASN beralih status menjadi PPPK pada tahun 2025. Berikut adalah data pegawai berdasarkan golongan PNS dan PPPK yang terdiri dari :

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan 2025 Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	5
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	59
Total		71

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2025

Pada tabel diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang, Eselon IV sebanyak 3 orang, Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) sebanyak 5 orang, Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 59 orang.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Tahun 2025 Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	-	-	-	1	1
4	Kasubag Program	-	-	1	-	1
5	Kasubag Keuangan	-	-	-	1	1
6	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	1	1
7	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-	-	1	4	5
9	Fungsional Pelaksana (Staf)	2	10	45	2	59
Total		2	10	47	12	71

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 47 orang (66,20%) dari total 71 orang pegawai yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi, Seimbang dan Sejahtera”.

b. Misi

1. Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima dan akuntabel;
2. Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi Sumber Daya Manusia, teknologi informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta sarana pendukung lainnya.

E. Program dan Kegiatan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 5 Program, 11 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.2. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.3.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2. Program Pendaftaran Penduduk:
 - 2.1. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 2.1.1. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil:
 - 3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 3.1.1. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
 - 3.2. Pemberiaan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 3.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
 - 4.1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4.1.1. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan Yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan:
 - 5.1. Penyediaan Profil Kependudukan
 - 5.1.1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

BAB V
PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Realisasi Anggaran :

- Realisasi Belanja Daerah	Rp. 10.553.886.606,00
Belanja Operasi	Rp. 9.569.596.606,00
Belanja Modal	Rp. 984.290.000,00

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa.

Makassar, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan

TTD

Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, S.E., M.T.
NIP. 19660902 198810 1 001
Pangkat: Pembina Utama Madya